



Program SIKNAS Pemerintah Indonesia

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KESEHATAN | JUMAT, 17 JUNI 2022

Anggota Kelompok I :

Dewi Yanti	2010101014
Tika Eliyanti	2010101015
Niken Dayu Farasati	2010101016
Fuji Padia Ramdani	2010101017
Peny Alvionita	2010101018
Hanisa	2010101019
Intan Choiril Meita A.	2010101020

DOSEN PENGAMPU : IBU FAYAKUN NUR RAHMAH, S.ST., M.P.H

Program SIKNAS Pemerintah Indonesia

Salah satu program pemerintah yang saat ini sudah berjalan di Indonesia terkait dalam proses berjalannya SIKNAS adalah dalam **Upaya dan Pembiayaan kesehatan contohnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).**

Apa Program JKN sebagai salah satu SIKNAS?



Salah satu program pemerintah yang saat ini sudah berjalan di Indonesia adalah JKN sebagai salah satu jaminan dalam upaya dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Mengapa Perlu JKN?

- JKN Memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau
- Asuransi kesehatan social menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu
- Asuransi kesehatan social menjamin *sustainability* (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan)
- Asuransi kesehatan social yang *portabilitas*, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia

Manfaat JKN

- Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.
- Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.
- Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat yang Tidak Dijamin JKN

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada manfaat yang tidak dijamin meliputi:

- a. Tidak sesuai prosedur;
- b. Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS;
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik;
- d. General checkup, 32 Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional pengobatan alternatif;
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi;
- f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana ; dan
- g. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba.

Bagaimana Berjalannya JKN di Indonesia

- Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 01 Januari 2014. Memasuki tahun ke-9, cakupan kepesertaan telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia.
- Program ini juga terbukti telah berkembang menjadi program yang memiliki kontribusi besar dan mampu mengakomodir 1,5 miliar layanan sejak tahun 2014. Tidak hanya dari sisi kesehatan, Program JKN juga telah berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perekonomian terutama dalam hal mencegah kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
- Pengamat Asuransi Kesehatan Sosial, dr. Hasbullah Thabrany mengungkapkan, implementasi JKN-KIS adalah program bersama dimana peserta bergotong royong, belanja kesehatan yang menjadi syarat ,agar setiap orang di Indonesia bisa sehat dan hidup produktif.

Kekurangan Program JKN di Indonesia

1. Terlalu Ambisius dan Politis (Hal ini disebabkan karena JKN menanggung semua jenis layanan kesehatan dengan premi murah dan menargetkan universal coverage dalam waktu singkat. Padahal, di negara2 lain, jaminan sosial dikembangkan secara bertahap, layanan yang ditanggung makin komprehensif, sehingga kapasitas keuangan negara terukur.)
2. Defisit Tidak Ditangani Secara Komprehensif Defisit (Akibat defisit, RS yang tidak kunjung cair klaimnya, tidak mampu membayar jasa medis dan menunggak pembayaran obat. Sehingga mulai dari RS, Dokter, dan Perusahaan Farmasi, semuanya harus mengencangkan ikat pinggang pada era JKN ini.)
3. Penentuan besaran iuran tidak jelas. (Di satu sisi tidak mengikuti perhitungan aktuarial asuransi, di sisi lain tidak memperhatikan kemauan dan kemampuan bayar masyarakat. Upaya menarik premi dari kalangan pekerja mandiri juga tidak optimal.)
4. Upaya promotif preventif di layanan primer masih kurang berjalan.

Sekian, Terima Kasih.